

DKI Tunda *Groundbreaking* Rumah Tapak DP Rp 0



Sandiaga Uno. (Foto: Antara)

Penundaan dilakukan karena belum ada sinkronisasi harga dan skema pembayaran cicilan.

Program rumah tapak DP Rp 0 dilaksanakan oleh pihak swasta.

Lenny Tristia Tambun / YUD Rabu, 28 Februari 2018 | 09:42 WIB

<http://www.beritasatu.com/satu/480829-dki-tunda-groundbreaking-rumah-tapak-dp-rp-0.html>

Jakarta - Tidak mau terkesan terburu-buru dan dipaksakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menunda peresmian peletakan batu pertama atau *groundbreaking* rumah tapak dengan down payment (DP) Rp 0 di Rorotan, Jakarta Utara yang sedianya dilakukan hari ini, Rabu (28/2).

Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno mengatakan masih ada beberapa hal yang belum sinkron dalam rencana pembangunan rumah tapak dengan DP Rp 0 di Rorotan ini. Diantaranya, masih belum ada sinkronisasi dari sisi harga dan skema pembayaran cicilan rumah tersebut.

"Tadi malam saya *diupdate*, ada beberapa yang belum disinkronkan. Saya sampai malam, masih berteleponan dengan Pak Gubernur. Kemudian Pak Gubernur memberikan beberapa arahan. Pagi ini coba kita lihat," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (28/2).

Ia sendiri telah memberi arahan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI agar tidak terlalu memaksakan pelaksanaan *groundbreaking* harus dilaksanakan hari ini juga. Ia lebih memilih untuk menyelesaikan masalah yang belum sinkron terlebih dahulu. Sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang merugikan warga Jakarta.

"Arahan saya, jangan terlalu dipaksakan kalau memang belum ada yang sinkron. Tunda saja dulu, pastikan dulu dari harga dan skema, kemarin belum ada sinkronisasinya," tuturnya.

Baginya, tidak masalah menunda pembangunan rumah tapak DP Rp 0. Karena ia tidak ingin memberikan kesan yang membingungkan masyarakat mengenai program tersebut. Ia khawatir, masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang keliru mengenai program ini dikarenakan yang membangun pihak swasta.

"Yang penting kita tidak memberikan kesan yang membingungkan kepada masyarakat. Kalau ini benar-benar program pemerintah atau bukan program swasta. Jadi kita harus sinkronkan itu," ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com